

BELANJA DAERAH DI BALIK DOMINASI DANA TRANSFER

Siti Nur Reskiyawati Said
Universitas Negeri Makassar
siti.nur.reskiyawati@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah serta mengidentifikasi indikasi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten Maros periode 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis kontribusi untuk melihat hubungan antara sumber pendapatan daerah dengan Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD mengalami peningkatan selama periode penelitian, namun kontribusinya terhadap Belanja Daerah masih relatif lebih rendah dibandingkan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan tetap menjadi sumber pendapatan terbesar dalam struktur APBD Kabupaten Maros dan memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap Belanja Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan terhadap PAD. Dengan demikian, terdapat indikasi terjadinya *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten Maros selama periode penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sumber-sumber PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Belanja Daerah; *Flypaper Effect*; APBD; Kemandirian Fiskal.

Abstract

This study aims to analyze the development of Local Own-Source Revenue (PAD), Intergovernmental Transfers (Dana Perimbangan), and Regional Expenditure, as well as to identify indications of the Flypaper Effect in the Government of Maros Regency during the period 2021–2025. The study employed a quantitative descriptive approach using secondary data obtained from the Budget Realization Reports of Maros Regency. Data were collected through documentation and literature review methods. Data analysis was conducted using descriptive statistics and contribution analysis to examine the relationship between regional revenue sources and regional expenditure. The results indicate that Local Own-Source Revenue (PAD) increased during the study period; however, its contribution to Regional Expenditure remained relatively lower than that of Intergovernmental Transfers. Intergovernmental Transfers continued to be the largest source of revenue in the budget structure of Maros Regency and exerted a more dominant influence on Regional Expenditure. This condition suggests that Regional Expenditure is more responsive to transfer funds from the central government than to locally generated revenue. Therefore, the findings indicate the occurrence of the Flypaper Effect in the Government of Maros Regency during the study period. These findings imply that regional fiscal independence still needs to be strengthened through the optimization of local revenue sources in order to reduce dependence on central government transfers.

Keywords: Local Own-Source Revenue; Intergovernmental Transfers; Regional Expenditure; *Flypaper Effect*; Regional Budget; Fiscal Independence.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang menerapkan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Melalui pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2004). Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan dukungan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Kemampuan tersebut tercermin dari tingkat kemandirian fiskal yang salah satunya diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya. Tingginya kontribusi PAD menunjukkan semakin besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat (Rafi & Arza, 2023).

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai Belanja Daerah. Dana transfer tersebut diwujudkan melalui Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Perimbangan diberikan sebagai instrumen pelaksanaan desentralisasi fiskal sekaligus untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah (Republik Indonesia, 2004). Fenomena *Flypaper Effect* merupakan kondisi ketika Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat dibandingkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung meningkatkan pengeluaran berdasarkan dana transfer yang diterima daripada mengoptimalkan kemampuan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri (Oates, 1999).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah. Rizal et al. (2021) menemukan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan PAD terhadap Belanja Daerah. Penelitian Soeharjoto (2020) juga menunjukkan adanya indikasi *Flypaper Effect* pada pemerintah daerah di Indonesia. Sebaliknya, Putri (2020) menemukan bahwa PAD memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Belanja Daerah sehingga tidak ditemukan indikasi *Flypaper Effect*. Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak hanya diukur dari besarnya dana yang diterima daerah, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang dimiliki secara mandiri. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Daerah yang memiliki PAD tinggi cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Mardiasmo, 2004).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, PAD dan Dana Perimbangan merupakan dua sumber pendapatan utama yang berperan dalam membiayai Belanja Daerah. Belanja Daerah yang dikelola secara efektif dan efisien diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, apabila peningkatan Belanja

Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh Dana Perimbangan dibandingkan PAD, maka kondisi tersebut dapat menunjukkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (Republik Indonesia, 2022).

Hubungan antara PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah menjadi penting untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Selain itu, analisis terhadap ketiga variabel tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya fenomena *Flypaper Effect*, yaitu kondisi ketika pemerintah daerah lebih responsif terhadap dana transfer yang diterima dibandingkan terhadap pendapatan yang berasal dari daerah sendiri (Oates, 1999; Soeharjoto, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah serta mengidentifikasi indikasi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten Maros periode 2021–2025. Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggambaran dan analisis data keuangan daerah berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros tahun 2021–2025. Data tersebut diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maros sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji data yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah yang terdapat dalam Laporan Realisasi APBD Kabupaten Maros. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, dan *Flypaper Effect*. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan perkembangan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah selama periode penelitian. Selain itu, digunakan analisis kontribusi untuk mengetahui besarnya kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Maros.

Analisis kontribusi digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi indikasi *Flypaper Effect*. Indikasi *Flypaper Effect* ditunjukkan apabila kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan terhadap pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah:

$$\text{Kontribusi PAD} = (\text{PAD} / \text{Belanja Daerah}) \times 100\%$$

Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah:

$$\text{Kontribusi Dana Perimbangan} = (\text{Dana Perimbangan} / \text{Belanja Daerah}) \times 100\%$$

Hasil perhitungan kontribusi tersebut kemudian dianalisis untuk melihat tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Maros terhadap Dana Perimbangan serta mengidentifikasi adanya indikasi *Flypaper Effect* selama periode penelitian 2021–2025.

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengidentifikasi indikasi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten Maros, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah selama periode 2021–2025. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai struktur keuangan daerah serta tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hasil analisis perkembangan ketiga komponen tersebut disajikan pada tabel-tabel berikut.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros Tahun 2021–2025

Tabel 4.1 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Maros Tahun 2021–2025

<u>Tahun</u>	<u>Target PAD (Rp)</u>	<u>Realisasi PAD (Rp)</u>	<u>Persentase</u>
2021	304.840.000.000	221.410.000.000	72,66%
2022	295.600.000.000	286.340.000.000	96,87%
2023	296.930.000.000	291.050.000.000	98,02%
2024	307.960.000.000	302.090.000.000	98,10%
2025	389.130.000.000	318.680.000.000	81,90%

Sumber: BPKAD Kabupaten Maros, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4.1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat. Realisasi PAD meningkat dari Rp221,41 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp318,68 miliar pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

Meskipun demikian, tingkat pencapaian target PAD mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 realisasi PAD hanya mencapai 72,66% dari target yang ditetapkan, sedangkan pada periode 2022–2024 tingkat realisasi meningkat hingga mencapai lebih dari 96%. Pada tahun 2025 persentase realisasi menurun menjadi 81,90% karena target PAD meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara teoritis, peningkatan PAD mencerminkan meningkatnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Namun demikian, besaran PAD masih relatif kecil dibandingkan Dana Perimbangan sehingga tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Maros belum sepenuhnya optimal.

Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Maros Tahun 2021–2025

Tabel 4.2 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Maros Tahun 2021–2025

<u>Tahun</u>	<u>Dana Perimbangan (Rp Miliar)</u>
2021	1.048,48
2022	1.075,63
2023	1.102,75
2024	1.184,49
2025	1.088,30

Sumber: BPKAD Kabupaten Maros, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4.2, Dana Perimbangan Kabupaten Maros selama periode penelitian memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan PAD. Dana Perimbangan meningkat dari Rp1.048,48 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1.184,49 miliar pada tahun 2024 sebelum mengalami penurunan menjadi Rp1.088,30 miliar pada tahun 2025. Tingginya Dana Perimbangan menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Dana Perimbangan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan antar daerah. Namun demikian, dominasi Dana Perimbangan dalam struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri masih terbatas.

Temuan ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat mencerminkan belum optimalnya kemandirian fiskal daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Putri dan Kurnia (2021) yang menemukan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh lebih dominan terhadap Belanja Daerah dibandingkan PAD.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021–2025
Tabel 4.3 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021–2025

<u>Tahun</u>	<u>Belanja Daerah (Rp Miliar)</u>
2021	1.294,21
2022	1.356,42
2023	1.421,18
2024	1.621,55
2025	1.422,89

Sumber: BPKAD Kabupaten Maros, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4.3, Belanja Daerah Kabupaten Maros menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode penelitian. Belanja Daerah meningkat dari Rp1.294,21 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1.621,55 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya kebutuhan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Belanja Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi pemerintahan, dan berbagai program pembangunan lainnya. Namun demikian, pada tahun 2025 Belanja Daerah mengalami penurunan menjadi Rp1.422,89 miliar yang diduga dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan anggaran daerah dan kondisi fiskal pemerintah. Meskipun Belanja Daerah mengalami peningkatan, sebagian besar pembiayaan belanja masih berasal dari Dana Perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PAD dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah masih relatif terbatas.

Analisis Flypaper Effect pada Pemerintah Kabupaten Maros
Tabel 4.4 Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2021–2025

<u>Tahun</u>	<u>Kontribusi PAD (%)</u>	<u>Kontribusi Dana Perimbangan (%)</u>
2021	17,10	81,01
2022	21,11	79,30

2023	20,48	77,59
2024	18,63	73,05
2025	22,40	76,48

Sumber: BPKAD Kabupaten Maros, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4.4, kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah selama periode 2021–2025 berada pada kisaran 17,10% hingga 22,40%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan Belanja Daerah Kabupaten Maros masih relatif rendah. Walaupun PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap Belanja Daerah belum mampu menggantikan peran Dana Perimbangan sebagai sumber utama pembiayaan daerah.

Sebaliknya, kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah berada pada kisaran 73,05% hingga 81,01%. Tingginya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Belanja Daerah Kabupaten Maros masih dibiayai oleh transfer pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Perbandingan kontribusi PAD dan Dana Perimbangan menunjukkan bahwa Belanja Daerah Kabupaten Maros lebih responsif terhadap Dana Perimbangan dibandingkan PAD. Dengan kata lain, peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap Belanja Daerah dibandingkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya fenomena *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten Maros selama periode 2021–2025.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori *Flypaper Effect* yang menyatakan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pengeluaran pemerintah daerah dibandingkan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Putri dan Kurnia (2021) serta Samtia (2022) yang menemukan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh lebih dominan dibandingkan PAD terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Maros masih relatif rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan penerimaan PAD melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal agar ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dapat dikurangi dan kemandirian fiskal daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros mengalami peningkatan selama periode 2021–2025, namun kontribusinya terhadap Belanja Daerah masih lebih rendah dibandingkan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan tetap menjadi sumber pendapatan terbesar dan memiliki peran yang lebih dominan dalam pembiayaan Belanja Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Belanja Daerah Kabupaten Maros lebih responsif terhadap Dana Perimbangan dibandingkan PAD, sehingga mengindikasikan terjadinya *Flypaper Effect*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Maros masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sumber-sumber PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Bibliografi

- Abdullah, S., & Halim, A. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis *Flypaper Effect* belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77–91.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros. (2026). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021–2025. Maros: BPKAD Kabupaten Maros
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159
- Fidiawani, M., Timur, I., & Gaffar, A. (2023). Analisis Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros. *KAIZEN: Kajian Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Kewirausahaan*, 2(2), 1-11.
- Inman, R. P. (2008). *The Flypaper Effect*. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 14579.
- Kuncoro, H. (2004). Pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 47–63.
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11(1), 67–80.
- Maimunah, M. (2006). *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putri, Z. M. (2020). *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–22.
- Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis *Flypaper Effect* pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 411–427.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Rizal, Y., Safuridar, & Siregar, M. A. (2021). Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 133–145.
- Soeharjoto. (2020). *Flypaper Effect* on Regional Spending in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 4(3), 521–530.
- Utami, S., & Iskandar, D. D. (2021). *Flypaper Effect* terhadap determinan Belanja Daerah dan determinan Pendapatan Asli Daerah pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2013–2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 202–218.